



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 31 Desember 2024
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang



BUDI YANA SANTOSA, ST
NIP 19730519 200501 1 006

DAFTAR ISI

.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Permasalahan dan Isu Strategis	2
1.4. Uraian Singkat Organisasi	3
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.1.3 Strategi	13
2.1.4 Arah Kebijakan	14
2.1.5 Program	15
2.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja	19
BAB IV	42
PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Perbaikan Kedepan	42

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas PUTR, telaahan visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Isu Strategis dalam Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Bina Marga	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi lokal, belum responsifnya penindakan pada kerusakan spontan.	Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai
2	Permasalahan dalam Pengairan	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, masih lemahnya pengembangan metode-metode teknis pelayanan dalam menyelesaikan masalah pengairan	Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai
3	Permasalahan alam Tata Ruang	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.	Belum optimalnya instrumen penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Sumedang
4.	Permasalahan dalan jasa konstruksi	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, pembinaan terhadap jasa konstruksi masih lemah, belum lengkapnya regulasi hukum dan instrumen SOP sebagai pendukung pelayanan.	Masih lemahnya kualitas penyedia jasa konstruksi Kabupaten Sumedang
	Permasalahan dalam Cipta Karya	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih terdapat bangunan negara yang tidak sesuai standar layak fungsi;	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Cipta Karya

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sumedang

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai;
2. Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai;
3. Belum optimalnya sistem penataan ruang Kabupaten Sumedang;
4. Masih lemahnya kualitas penyedia jasa konstruksi Kabupaten Sumedang.
5. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Cipta Karya

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2024

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda - IV/c	S 2	1	Plt.
2	Sekretariat			22	
	Sekretaris	Pembina - IV/a	S 2	1	
	- Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Pengelola Program dan Kegiatan	-	-	-	
	Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Pranata Komputer	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda – III/b	S 1	1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Persuratan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Bendahara Pengeluaran	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Bendahara Penerimaan	Penata – III/c	S 1	1	
	- Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	Pengatur Tk. I – II/d	D 3	1	
	- Pengelola Gaji	Penata Muda Tk.I - III/c	D 3	1	
	- Pengelola Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
		-	-	-	
	- Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda – III/a	SLTA	3	
	-	Pengatur TK.I II/d	SLTA	1	
	-	Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Penerimaan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
3	Bidang Bina Marga			17	
	Kepala Bidang Bina Marga	Penata TK.I – III/d	S 2	1	
	-				
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2	
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Pertama	Penata Muda TK I – III/b	S 1	5	
	- Analis Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengawas Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	- Pemeriksa Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	Pengelola Pembangunan & Peningkatan Jalan	Penata Muda – III/b	D 3	1	
	Penilik Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	2	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
4.	Bidang Sumber Daya Air			19	
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pembina – IV/a	S 2	1	
	Teknik Pengairan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
		Penata TK.I – III/d	S1	1	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	Analisis Sumber Daya Air	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda – III/a	S 1	2	
	Pengawas Irigasi	Penata Muda TK I – III/b	S 1	2	
		Penata Muda – III/a	S1	1	
		Penata Muda – III/a	S1	2	
	Pengamat Operasi dan Pemelihara	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
	Pengelola Pemelihara Jaringan Irigasi	Pengatur – II/c	D 3	2	
	Pengelola Sumber Daya Air	Pengatur – II/c	D 3	1	
	Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Penata Muda Tk.I – III/b	SLTA	1	
		Penata Muda – III/a	SLTA	2	
		Pengatur TK I – II/d	SLTA	1	
	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA		
5.	Bidang Cipta Karya			19	
	Kepala Bidang Cipta Karya	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda TK I – III/b	S2	1	
		Penata Muda tk I – III/b	S 1	1	
	Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
	Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	2	
	Pengawas Bangunan Gedung dan Pemukiman				
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	2	
		Penata Muda – III/a	S 1	2	
	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Pengatur – II/c	D 3	2	
	Pengadministrasi Pemelihara Gedung Kantor	Penata Muda – III/a	SLTA	2	
		Pengatur TK I – II/d	SLTA	1	
6.	Bidang Tata Ruang			11	
	Kepala Bidang Tata Ruang	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	Teknik Penata Ruang Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	Teknik Penata Ruang Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	Pengawas Tata Ruang	Penata Muda – III/b	S 2	1	
		Penata Muda TK I – III/b	S1	1	
	Analisis Tata Ruang				
	Analisis Pemanfaatan Ruang	Penata Muda Tk.I – III/b	S 2	1	
	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
		Pengatur TK I – II/c	D 3	2	
	Perencana Teknis Tata Ruang Kota dan Desa				
	Penyusun Rencana Tata Ruang	Penata Muda – III/a	S1	1	
	Ahli Pertama Surveyor Pemetaan	IX	S1	2	
7.	Bidang Bina Konstruksi			6	
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2	
	Penelaah Mutu Konstruksi	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	Pengelola Jasa Konstruksi				
		Pengatur TK I – II/d	D 3	2	
	Pengadministrasi Umum				
8.	UPTD			69	
	UPTD Peralatan & Perbengkelan			19	
	Kepala UPTD Peralatan & Perbengkelan	Penata TK I – III/d	S 2	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata - III/c	S1	1	
	Operator Alat Berat	Penata Muda – III/a	SLTA	10	
		Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	4	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
		Pengatur Muda TK. I – II/b	SLTA	1	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a	SLTP	1	
	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			4	
	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Penata Muda – III/c	S 1	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata Muda TK I – III/b	S1	1	
	Pengelola Pemelihara Laboratorium	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1	
	Penguji Laboratorium, Tanah, Aspal dan Beton	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1	
	UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari			6	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari	Penata – III/c	S 1	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Penata MudaTK I - III/b	D3	1	
		Pengatur Tk. – II/d	SLTA	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Pamulihan			3	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Pamulihan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	Pemelihara Jalan	Pengatur TK I – II/d	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota			3	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	Plt
	Kasubag Tata Usaha	Penata TK. I – III/d	S 2	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur – II/a	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan				
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Cimalaka			4	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Cimalaka	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Conggeang			5	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Conggeang	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata TK I– III/d	S 1	1	
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
		Pengatur – II/a	SD	1	
	UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta			5	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta	Penata TK I– III/d	S 2	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata TK I III/d-	S1	1	
	Pemelihara Jalan	Penata Muda TK I – III/b	S 1	2	
		Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Tomo			9	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tomo	Penata TK I – III/d	S 1	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
		Pengatur – II/c	SLTA	2	
	Pemelihara Jalan	Pengatur – II/c	SLTA	3	
	UPTD PUTR Wilayah Situraja			7	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Situraja	Penata – III/c	S1	1	Plt
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Wado			4	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Wado	Penata Tk. I – III/d	S 2	1	
	Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
	Honoror			311	
			S 2	13	
			S 1	73	
			D3	13	
			SLTA	59	
			SLTP	3	
			SD	1	
	Jumlah PNS			162	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Honorer			311	
	Jumlah Total				

Sumber : DUK Per 29 Desember Tahun 2023 Dinas PUPR Kab. Sumedang

1.4.3. ondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Buldozer	1	1			
2	Wheel Excavator + Attachment	4	1	3		
3	Excavator lainnya (dst)	1		1		
4	Dump Truck	3		2	1	
5	Vibration Roller	2	2			
6	Stamper	8		6	2	
7	Vibration Plate	2	2			
8	Compacting equipment lainnya (dst)	24	2	22		
9	Truck Crane	1		1		
10	Alat pengangkat lainnya (dst)	1	1			
11	Portable Generating Set	1	1			
12	Portable Water Pump	15	4	1	10	
13	Jeep	1		1		
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	7	2		
15	Truck + Attachment	1		1		
16	Pick Up	7	3	4		
17	Yeengler/Trailer	1		1		
18	Sepeda Motor	50	23	26	1	
19	Mobil Tangki Air	1		1		
20	Panhard	2			2	
21	Gerobak Dorong	28	28			
22	Mesin Gerinda	1			1	
23	Mesin Kompresor	2			2	
24	Mesin Bor Tangan	1	1			
25	Winder	1		1		
26	Mesin Gergaji	16	16			
27	Mesin Bor Kayu	1			1	
28	Peralatan Las Listrik	1			1	
29	Peralatan Las Karbit	1			1	
30	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1			1	
31	Water Pas	9		9		
32	Meteran Kain	72	72			
33	Rol Meter	98	80	16	2	
34	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	62	62			
35	Global Positioning System	45	31	12	2	
36	Alat Ukur Sigmat	5	5			
37	Picnometer	8		8		
38	Bejana Ukur	1		1		
39	Alat Penakar Hujan	1	1			
40	Pacul	141	141			
41	Garpu Pacul	96	96			
42	Garu	45	45			
43	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	140	140			

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
44	Arit	135	135			
45	Pacul Dangir	90	90			
46	Alat Pengambil Sample Tanah	3	3			
47	Alat Laboratorium lainnya	4		4		
48	Container	3		3		
49	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4		3	1	
50	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3		3		
51	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	7		3	4	
52	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	20		20		
53	Mesin Stensil Listrik Folio	1			1	
54	Mesin Fotocopy Folio	2	2			
55	Lemari Kayu	70	1	69		
56	Rak Kayu	8	6	2		
57	Filing Cabinet Besi	85	34	51		
58	Lemari Kaca	2	1	1		
59	CCTV - Camera Control Television System	1	1			
60	Papan Visual/Papan Nama	1	1			
61	White Board	1		1		
62	Alat Penghancur Kertas	8	8			
63	Mesin Absensi	35	35			
64	Overhead Projector	9	5	4		
65	Papan Nama Instansi	27	26	1		
66	Papan Pengumuman	3	3			
67	Alat Kantor Lainnya	5	5			
68	Meja Kerja Besi/Metal	15	1	14		
69	Meja Kerja Kayu	10			10	
70	Kursi Kayu	68		3	65	
71	Sice	12		10	2	
72	Meja Rapat	5	2	3		
73	Meja Ketik	1	1			
74	Meja Telepon	7			7	
75	Meja Resepsionis	2	2			
76	Meja Panjang	1			1	
77	Meja 1/2 Biro	407	105	265	37	
77	Kursi Rapat	70		70		
78	Kursi Tamu	12	4	8		
79	Kursi Putar	50	33	16	1	
80	Kursi Biasa	18		3	15	
81	Kursi Lipat	799	333	409	57	
82	Meja Komputer	11	3	1	7	
83	Meubeleur lainnya	22	1	20	1	
84	Jam Elektronik	1	1			
85	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1			
86	Mesin Pemotong Rumput	46	29	17		
87	Lemari Es	2	2			
88	A.C. Window	20	18	2		
89	A.C. Split	4	4			
90	Kipas Angin	17	16	1		
91	Exhaust Fan	5	5			
92	Kompor Gas (Alat Dapur)	7		7		
93	Rice Cooker (Alat Dapur)	41		41		
94	Rice Warmer	1		1		
95	Televisi	8	8			
96	Amplifier	1	1			
97	Loudspeaker	7	7			
98	Sound System	2	2			
99	Camera Video	59	32	27		
100	Dispenser	3	3			
101	Tangga Hidrolik	1	1			
102	Handy Cam	9	3	6		

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
103	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	3	1		
104	Alat Pemadam/Portable	2			2	
105	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	15	4		
106	Telephone Hybrid	1			1	
107	Microphone/Wireless MIC	1	1			
108	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	7			
109	Video Tape Recorder Portable	1	1			
110	Slide Projector	3	3			
111	Layar Film/Projector	3	3			
112	Camera Conference	2	2			
113	Waterpas	3	3			
114	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2			
115	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	9	6	3		
116	Pesawat Telephone	12		12		
117	Telephone Mobile	7	7			
118	Handy Talky (HT)	23	23			
119	Facsimile	2	2			
120	Alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	2	2			
121	Wireless Amplifier	2		2		
122	Elektrik Compression Tester	2		2		
123	Drill Machine	6	6			
124	Saw Machine For Concret	1	1			
125	Alat Pemeriksa Agrigat	6	6			
126	Prganic Impuris Test Set	1		1		
127	Slump Test Set	4	1	3		
128	Concrette Hammer Set	4	2	2		
129	Beaker Toll From Graduates	3		3		
130	Alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)	139		139		
131	Modified Mold	13		13		
132	Heavy Duty Solution Balance	1		1		
133	Drilling	2	2			
134	Lightweight Concrete Test Hammer	1	1			
135	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	1	1			
136	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	168		168		
137	Drying Oven	1		1		
138	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1		1		
139	Timbangan/Neraca	7		7		
140	Alat Destilasi Air	1		1		
141	Crusible Penyaring	8		8		
142	Alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	1		1		
143	Mesin Drawing	1			1	
144	Ketel Pemasakan	1		1		
145	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	1			
146	Diamond Saw	1	1			
147	Tachometer (General Laboratory Tool)	2			2	
148	Beaker	1		1		
149	Optical Clinometer	2	2			
150	peralatan hidrologi lainnya (dst)	1		1		
151	Golok	80	80			
152	Komputer Jaringan lainnya	1		1		
153	P.C Unit	118	86	16	16	
154	Lap Top	130	118	12		
155	Note Book	6	4		2	
156	Hard Disk	1		1		
157	Keyboard (Peralatan Mainframe)	8		8		
158	peralatan mainframe lainnya (dst)	1			1	
159	Speaker Komputer	8	1	7		

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
160	Peralatan Minikomputer lainnya	69	4	65		
161	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5		5		
162	Monitor	8	3	5		
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	175	156	5	14	
164	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	5	1		
165	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	6			
166	Server	1	1			
167	Router	2	2			
168	Modem	2	2			
169	Peralatan Jaringan lainnya	4	4			
170	Sepatu Boot	108	108			
171	Sepatu lapangan lainnya (dst)	69	69			
172	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	1			

Sumber : Aplikasi SIPASTI BMD

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Tidak dilakukan telaahan Visi Dan Misi Kepala Daerah dikarenakan belum ada Kepala Daerah definitif .

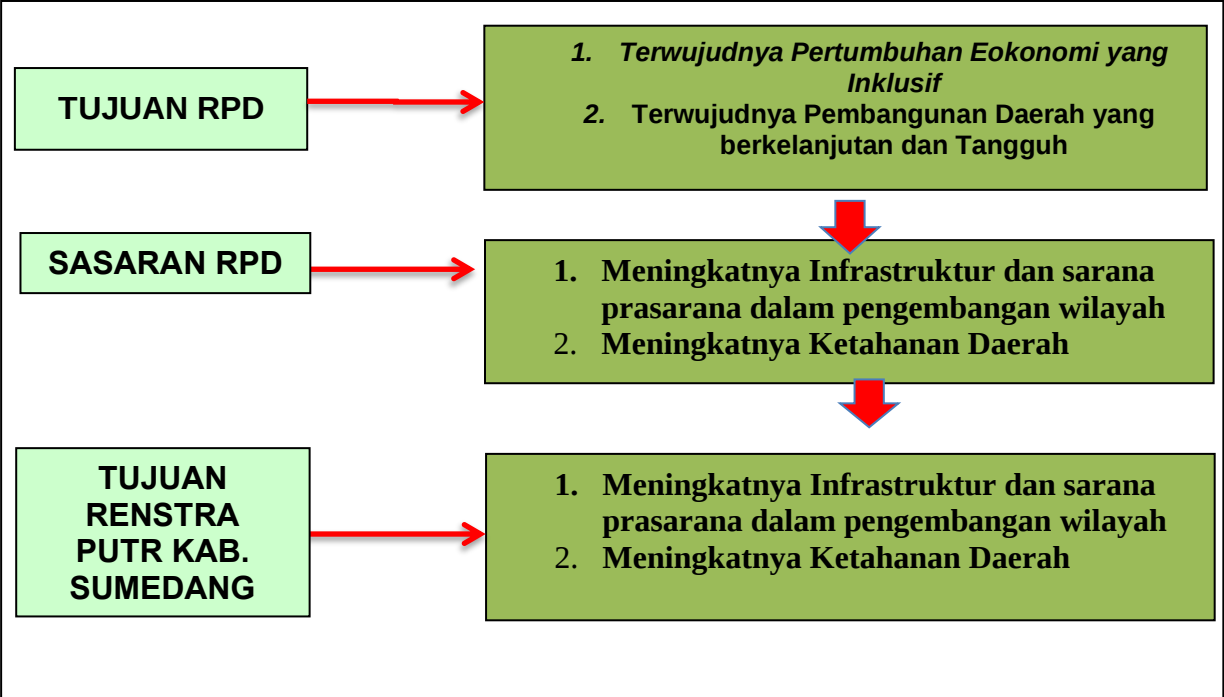
2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas PUTR adalah :

Tujuan dan Sasaran Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

- 1. Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah
- 2. Meningkatnya Ketahanan Daerah

Adapun keterkaitan tujuan Dinas PUTR dengan Tujuan dan Sasaran RPD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran RPD

Tujuan RPD	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
			Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
			Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak
			Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata
			Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
			Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembijnaan
	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang untuk periode 2024-1016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan;
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
5. Optimalisasi Tata Ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Penyelesaian penyusunan seluruh rencana tata ruang yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional;
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;	Mengoptimalkan kualitas perencanaan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
2	Meningkatkan sistem informasi data/digitalisasi yang menunjang program pembangunan infrastruktur;	Meningkatkan sistem informasi database berbasis aplikasi;
3	Preservasi Jalan dan jembatan;	Peningkatan konektivitas jalan;
4	Pembangunan jalan dan jembatan;	
5	Penataan jalan di Kawasan perkotaan, Kawasan strategis;	
6	Penanganan dan pencegahan di Kawasan Rawan Bencana;	
	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Fasilitasi kebutuhan pertanian, perikanan, dan peternakan
		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
		Pembangunan dan pemeliharaan pintu air
7	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;	Memenuhi kebutuhan akses air minum masyarakat
8	Meningkatkan bangunan dengan sertifikasi laik fungsi	Melakukan pendataan dan pengawasan serta sertifikasi terhadap bangunan
9	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi
		Membuat sistem data dan informasi jasa konstruksi
10	Peningkatan koordinasi dan Penyelesaian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna mendukung kemudahan investasi yang terintegrasi;	Penyusunan dan koordinasi penetapan rencana tata ruang dengan bertahap sesuai kebijakan prioritas Nasional dan Regional
11	Membangun Sistem terintergerasi Pemanfaatan Ruang dengan pengendalian Ruang dalam platform digital untuk mempercepat pengambilan keputusan	Peningkatan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui system OSS RBA, pengkajian dan pengesahan terhadap Rencana Tapak/Site Plan serta optimasiliasi pengendalian pemanfaatan ruang
12	Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pemanfaatan ruang wilayah	Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembijnaan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penataan Bangunan Gedung

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

3.2. 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	72,25	
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan Irigasi	Persen	71,35	
Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	72,25	
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan (Persen)	Persen	33,34	
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	82,1	
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	73,75	
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen	96,12	
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	72,25	

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

Tabel 2.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024Dengan Data Awal Tahun 2024 dan Target Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
1	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen		71,35	73,68
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen		82,1	83,16
3	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen		96,12	96,61
4	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	Persen		73,75	83,75
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	-	91,50	94,72
6	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembijnaan	Persen	-	33,34	100
7	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	-	72,25	75,38

Sumber : Renstra Dinas PUTR Kab. Sumedang

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	91,50
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan Irigasi	Persen	71,35
Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen	72,25
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan (Persen)	Persen	33,34
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	82,1
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen	73,75
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen	96,12

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN

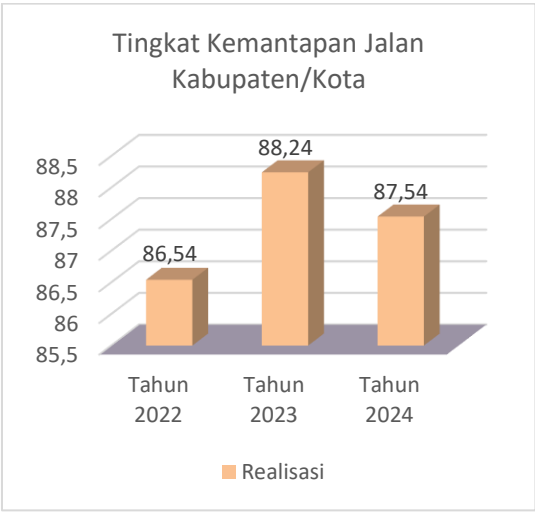
INDIKATOR : TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN/KOTA



Definisi Menurut Permen PU No.13 tahun 2011 Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Untuk mengetahui proporsi kondisi jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten dan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 95,67 % dari target sebesar 91,50 % dan terealisasi sebesar 87,54%.

Dari segi realisasi, Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota menurun -0,70 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 88,24% dan tahun 2024 sebesar 87,54%. Begitu pula dari aspek pencapaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota menurun sebesar -7,77% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 103,45% dan pada tahun 2024 sebesar 91,5%.



Gambar 3.1 Trend Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Sumedang Dari Tahun 2022-2024

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian **Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota** tahun 2024 yaitu sebesar 92,42% dari target akhir RENSTRA sebesar 98,75% dan terealisasi 87,54% pada tahun 2024.

Pada tingkat Provinsi, **Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Sumedang** tahun 2024 berada **di atas** rata rata Provinsi dengan selisih 0,54% dari rata rata Provinsi Jawa Barat sebesar 87%.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh Persentase panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,12% dengan Total Panjang Jalan Kondisi Mantap hanya sepanjang 710 km. Ketidakberhasilan capaian Persentase panjang jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dipengaruhi oleh Pemeliharaan Jalan secara rutin yang hanya terealisasi sepanjang 12,348 km.

Selain dari factor diatas terdapat pula factor penyebab ketidaktercapaian tersebut yaitu adanya penambahan Total Panjang Jalan Kabupaten dari 774,368 km menjadi 811,318 kilometer sesuai dengan surat keputusan Bupati Sumedang Nomor 375 Tahun 2024, sehingga factor pembagi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Sumedang nya bertambah besar.

Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2025 meliputi perbaikan intervensi antara lain :

- 1. Penyesuaian Target Renstra DPUTR Tahun 2025-2029 sesuai dengan Total Panjang Jalan Kabupaten Mengikuti surat keputusan Bupati Sumedang Nomor 375 Tahun 2024, panjang ruas jalan 811,318 kilometer.
- 2. Prioritas penanganan jalan pada kondisi rusak berat
- 3. Optimalisasi Pemeliharaan jalan secara rutin.

Adapun program dari kegiatan penunjang Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas tidak dapat dihitung dikarenakan Capaian Kinerja kurang dari 100%. Anggaran Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp. 63.041.397.705,00 . Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 59.842.407.428,00 atau 94,93 %.

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	63.041.397.705,00	59.842.407.428,00	94,93
Jumlah Total	63.041.397.705,00	59.842.407.428,00	94,93

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA
KEBERLANJUTAN DAN
KETERSEDIAAN AIR UNTUK
IRIGASI

INDIKATOR PERSENTASE
LUAS DAERAH IRIGASI
KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA YANG DI
LAYANI OLEH JARINGAN
IRIGASI

Definisi Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Di Layani Oleh Jaringan Irigasi adalah Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Kabupaten Sumedang telah berhasil Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Air Untuk Irigasi menunjukan kondisi yang lebih baik. Adapun capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Di Layani Oleh Jaringan Irigasi pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100,07 % dari target sebesar 71,35 % dan terealisasi sebesar 71,40%.

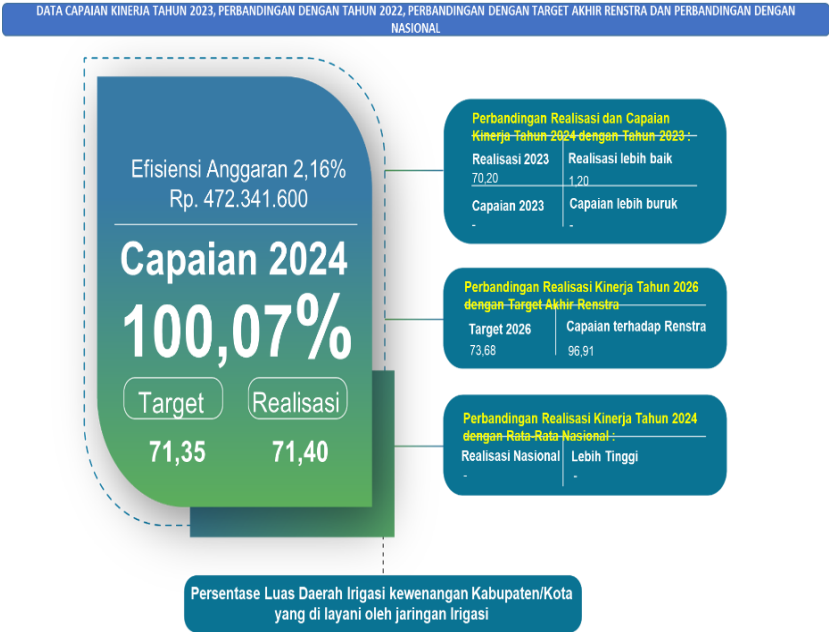
Dari segi realisasi, Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Di Layani Oleh Jaringan Irigasi Naik 1,20 %dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 70,20% dan tahun 2024 sebesar 71,40%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Tidak bisa dihitung dikarenakan merupakan Indikator baru jadi tidak ada target pada tahun 2023.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Di Layani Oleh Jaringan Irigasi tahun 2024 yaitu sebesar 96,91% dari target akhir RENSTRA sebesar 73,68% dan terealisasi 71,40% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan Irigasi hanya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Di Layani Oleh Jaringan Irigasi adalah **Meningkatnya Luas Lahan Yang terairi Jaringan Irigasi ditandai dengan** Luas lahan yang terairi adalah 21.468,55 Ha. Meningkatnya Luas Lahan yang terairi didukung oleh Meningkatnya Tingkat Kondisi Daerah Irigasi Baik ditandai dengan Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik sepanjang 14,388 km, yang didukung oleh:

1. Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 2,241km
2. Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang, 10,947km
3. Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 1,2km
4. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen.



Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi :

- 1. Penyelarasan Data Base Irigasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Sumedang
- 2. Prioritas Penanganan Jaringan Irigasi kondisi rusak berat

Adapun program dari kegiatan penunjang Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Air Untuk Irigasi yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda). Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 2,16% atau setara Rp 472.341.600. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.885.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.413.258.400,00 atau 97,84 %.

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan IrigasiTahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	21.885.600.000,00	21.413.258.400,00	97,84
Jumlah Total	21.885.600.000,00	21.413.258.400,00	97,84

SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA
KEBERLANJUTAN DAN
KETERSEDIAAN AIR MINUM

INDIKATOR PERSENTASE
JUMLAH RUMAH TANGGA
YANG MENDAPATKAN AKSES
TERHADAP AIR MINUM
MELALUI SPAM JARINGAN
PERPIPAAN DAN BUKAN
JARINGAN PERPIPAAN
TERLINDUNGI TERHADAP
RUMAH TANGGA DI SELURUH
KABUPATEN/KOTA



Definisi Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten Sumedang adalah mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Kabupaten Sumedang telah berhasil Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Air Minum menunjukan kondisi yang lebih baik. Adapun capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100,29 % dari target sebesar 82,10 % dan terealisasi sebesar 82,34%.

Dari segi realisasi, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Naik 0,47

%dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 81,87% dan tahun 2024 sebesar 82,34%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota menurun sebesar 6,33% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 106,46% dan pada tahun 2024 sebesar 100,29%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tahun 2024 yaitu sebesar 99,01%. dari target akhir RENSTRA sebesar 83,16% dan terealisasi 82,34% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota hanya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dipengaruhi oleh Terwujudnya sistem penyediaan air minum yang bersih ditandai dengan meningkatnya Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota adalah 247.022 Rumah Tangga. Terwujudnya sistem penyediaan air minum yang bersih didukung oleh Meningkatnya SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan ditandai dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota yaitu 1427 Rumah Tangga yang didukung oleh :

1. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebanyak 52 lt/det
2. Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 1 dokumen

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi :

1. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha
2. Peningkatan cakupan area layanan Air Minum

Adapun program dari kegiatan penunjang Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Air Minum didukung Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 4,90% atau setara Rp 763.637.380,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.595.428.035,00dan terealisasi sebesar Rp. 14.831.790.655,00 atau sebesar 95,10%.

Tabel 3.3Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	15.595.428.035,00	14.831.790.655,00	95,10
Jumlah Total	15.595.428.035,00	14.831.790.655,00	95,10

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA BANGUNAN PEMERINTAH DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA
INDIKATOR : PERSENTASE BANGUNAN PEMERINTAH DAN LINGKUNGANNYA YANG TERTATA



Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata adalah merupakan perbandingan atau rasio Jumlah Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata terhadap keseluruhan Bangunan Pemerintah di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang telah berhasil Meningkatkan Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata menunjukkan kondisi yang lebih baik. Adapun capaian Persentase Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 101,69 % dari target sebesar 73,75 % dan terealisasi sebesar 75%.

Dari segi realisasi, Persentase Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata Naik 7,50 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 67,50% dan tahun 2024 sebesar 75%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata naik sebesar 11,69% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90% dan pada tahun 2024 sebesar 101,69%.

Dilihat dari persfektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata tahun 2024 yaitu sebesar 89,55%. dari target akhir RENSTRA sebesar 83,75% dan terealisasi 75% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Persentase Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata hanya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor-Faktor Keberhasilan Persentase Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

1. Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan yang sesuai standar, ditandai dengan meningkatnya Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata yaitu 60 bangunan. Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan yang sesuai standar didukung oleh Meningkatnya bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten yang tertata dengan ditandai Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang tertata sebanyak 31 unit yang didukung oleh :
 - a. Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sebanyak 31 unit
 - b. Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 8 dokumen
2. Meningkatnya Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi tahun 2024 ditandai dengan Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi sebesar 61,27%. Meningkatnya bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi didukung oleh Meningkatnya kualitas pelayanan pendampingan pengelola teknis bangunan gedung ditandai dengan meningkatnya Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yaitu 210 Unit Bangunan. yang didukung oleh :
 - a. Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG sebanyak 210 dokumen.
 - b. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian sebanyak 3 bangunan Gedung.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain :

1. Melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut dan Evaluasi PBG
2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat akan pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Adapun program dari kegiatan penunjang Meningkatnya Bangunan Pemerintah Dan Lingkungannya Yang Tertata adalah Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,44% atau setara Rp 175.284.767,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.144.577.010,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.969.292.243,00 atau sebesar 98,56%.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata Tahun 2024

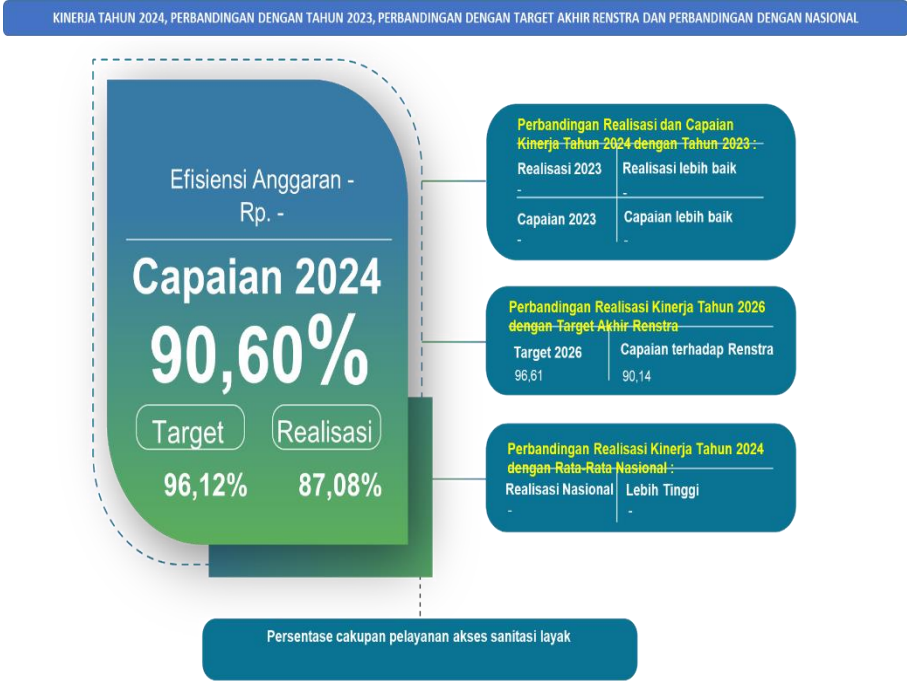
Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.135.000.000,00	1.085.425.300,00	95,63
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11.009.577.010,00	10.883.866.943,00	98,86
Jumlah Total	12.144.577.010,00	11.969.292.243,00	98,56

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA
KEBERLANJUTAN DAN
KETERSEDIAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
INDIKATOR : PERSENTASE
CAKUPAN PELAYANAN
AKSES SANITASI LAYAK

Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 90,60 % dari target sebesar 96,12 % dan terealisasi sebesar 87,06%.



Dari segi Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 , tidak bisa dibandingkan dikarenakan Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak merupakan indikator baru.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak tahun 2024 yaitu sebesar 90,14%. dari target akhir RENSTRA sebesar 96,61% dan terealisasi 87,08% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak hanya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak adalah belum optimalnya rumah tinggal bersanitasi ditandai dengan Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 87,06%. belum optimalnya rumah tinggal bersanitasi disebabkan oleh belum optimalnya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sistem air limbah domestik yaitu 261.230 Rumah Tangga dan dipengaruhi oleh Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat hanya sebanyak 1010 Rumah Tangga.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi :

- 1. Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat jangka panjang pemasangan Toilet dan Tangki Septik
- 2. Penambahan Usulan Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar

Adapun Meningkatnya Keberlanjutan Dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah didukung oleh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 1,44% atau setara Rp 175.284.767,00. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas tidak dapat dihitung dikarenakan Capaian Kinerja kurang dari 100%. Anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 10.449.375.700,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 10.393.389.300,00 atau 99,46 %.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.449.375.700,00	10.393.389.300,00	99,46
Jumlah Total	10.449.375.700,00	10.393.389.300,00	99,46

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

SASARAN STRATEGIS 6
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFORMASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
INDIKATOR :
PERSENTASE PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN



Capaian Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 99,97 % dari target sebesar 33,34 % dan terealisasi sebesar 33,33%.

Dari segi Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 , tidak bisa dibandingkan dikarenakan Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan merupakan indikator baru.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan tahun 2024 yaitu sebesar 33,33%. dari target akhir RENSTRA sebesar 100% dan terealisasi 33,33% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaannya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor yang menyebabkan kegagalan Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan adalah belum optimalnya usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang ditandai dengan Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 83,22%. Belum optimalnya usaha jasa kontruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Sumedang yaitu 483 orang. Adapun paya-upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Sumedang adalah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan sebanyak 110 Orang
2. Belum Optimalnya Layanan informasi jasa konstruksi, ditandai dengan Jumlah data dan informasi jasa konstruksi sebanyak 5 Dokumen. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya Layanan informasi jasa konstruksi adalah Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota sejumlah 1 Dokumen
3. Belum Optimalnya Pengawasan pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten, ditandai dengan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 97 Proyek. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya Pengawasan pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten adalah Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sebanyak 50 badan usaha.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan jasa konstruksu.

Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi didukung Program Pengembangan Jasa Kontruksi. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas tidak dapat dihitung dikarenakan Capaian Kinerja kurang dari 100%. Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan tahun 2024 sebesar Rp. 625.000.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 592.577.850,00 atau 94,81 %.

Tabel 3....6. Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	625.000.000,00	592.577.850,00	94,81
Jumlah Total	625.000.000,00	592.577.850,00	94,81

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA KESELARASAN DAN TERINTEGRASINYA TATA RUANG WILAYAH
INDIKATOR : KETAATAN TERHADAP RTR

Definisi Pengertian atau definisi dari Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) adalah upaya untuk merencanakan peruntukkan penggunaan lahan ataupun pemanfaatan lahan yang sesuai dengan fungsi dan kewasannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah.

Kabupaten Sumedang telah berhasil Meningkatkan Keselarasan Dan Terintegrasinya Tata Ruang Wilayah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Adapun capaian Ketaatan Terhadap RTR pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 104,46 % dari target sebesar 72,24 % dan terealisasi sebesar 75,46%.

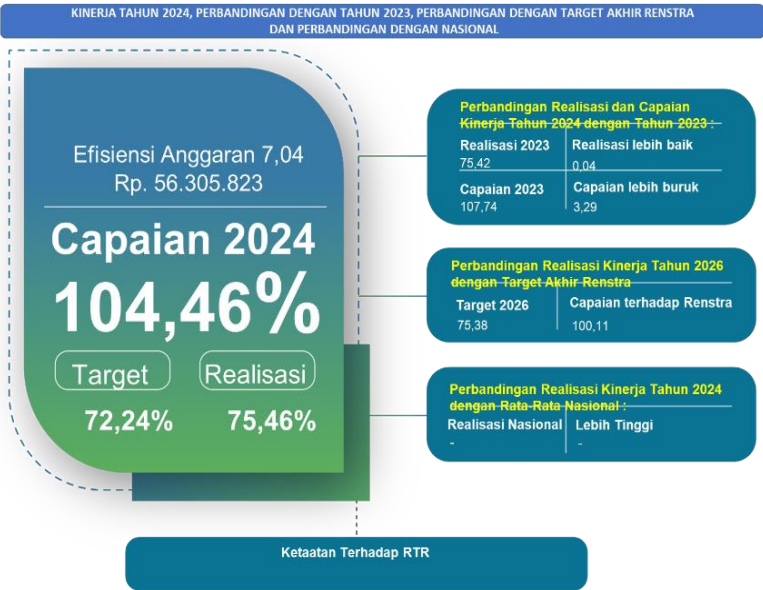
Dari segi realisasi, Ketaatan Terhadap RTR Naik 0,04 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 75,42% dan tahun 2024 sebesar 75,46%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Ketaatan Terhadap Rtr turun sebesar 3,29% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 107,74% dan pada tahun 2024 sebesar 104,46%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Ketaatan Terhadap RTR tahun 2024 yaitu sebesar 100,11%. dari target akhir RENSTRA sebesar 75,38% dan terealisasi 75,46% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Ketaatan Terhadap RTR hanya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan **Ketaatan Terhadap RTR** dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

1. Meningkatnya Ketersediaan RTR,ditandai dengan Persentase ketersediaan RTR yaitu 46,2%. Meningkatnya Ketersediaan RTR didukung oleh :
 - a. Meningkatnya Persentase rancangan peraturan kepala daerah untuk RTR dengan ditandai Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR sebanyak 4 Dokumen.Upaya-upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Persentase rancangan peraturan kepala daerah untuk



- RTR adalah Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota sejumlah 2 Dokumen.
- b. Meningkatnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten yang tersinkronisasi dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan nasional, dengan ditandai Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/kota sebanyak 3 Dokumen. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten yang tersinkronisasi dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan nasional adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota sebanyak 4 Dokumen.
2. Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Ruang, ditandai dengan Persentase pelayanan pemanfaatan ruang yaitu 71,91%%.
2. Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Ruang didukung oleh Meningkatnya Tersedianya berkas dokumen informasi ruang dan pengesahan rencana tapak ditandai dengan Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah sebanyak 20 Dokumen. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Tersedianya berkas dokumen informasi ruang dan pengesahan rencana tapak ditandai dengan Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan adalah :
- a. Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan sebanyak 13 Dokumen.
 - b. Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebanyak 24 dokumen



Berdasarkan gambar diatas Untuk mengakselerasi kinerja Ketaatan Terhadap RTR pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 73,31 % menjadi lebih besar dari 75,46%.Hal ini didorong juga oleh realisasi Ketaatan Terhadap RTR tahun 2024 sebesar 75,46% sudah melampaui target Ketaatan Terhadap RTR 2025 sebesar 73,31%.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Ketaatan Terhadap RTR yang dilakukan pada tahun 2025 meliputi:

1. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
2. Penetapan RTRW Kabupaten Kota

Meningkatnya Keselarasan Dan Terintegrasinya Tata Ruang Wilayah didukung oleh 1 program diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 7,04% atau setara Rp 56.305.823,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 743.694.177,00 atau sebesar 92,96%.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Ketaatan Terhadap RTR Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Tata Ruang	800.000.000,00	743.694.177.00	92,96
Jumlah Total	800.000.000,00	743.694.177.00	92,96

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

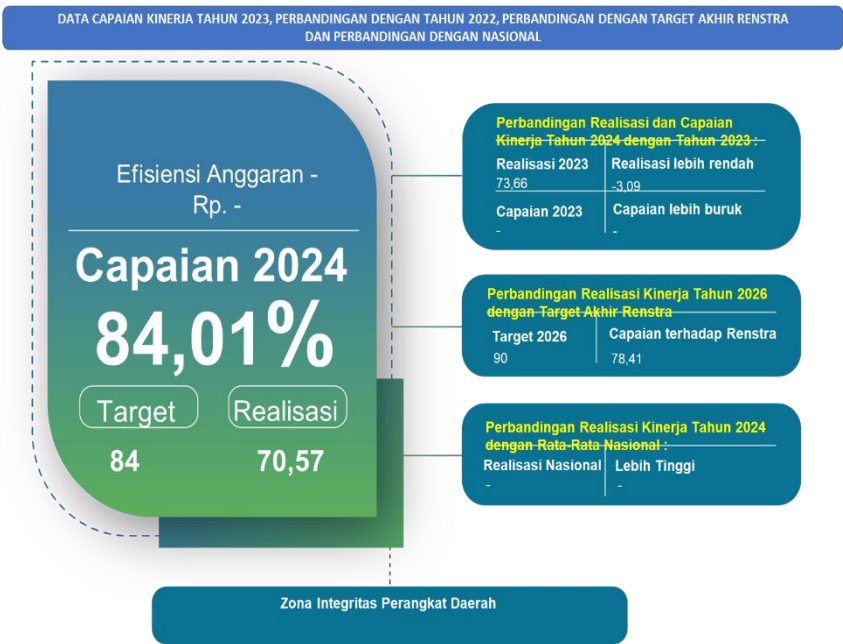
SASARAN STRATEGIS 8

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS INTERNAL PERANGKAT DAERAH DENGAN INDIKATOR NILAI ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH INDIKATOR : NILAI ZONA INTEGRITAS

Nilai Zona Integritas (ZI) adalah Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, Lembaga atau kementerian yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya-upaya seperti: Pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya akan membuat birokrasi menjadi lebih baik. Untuk memastikan bahwa Lembaga atau instansi public di Indonesia beroperasi dengan integritas dan transparansi yang tinggi, pemerintah Indonesia menggunakan instrument yang disebut Lembar kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI).

Capaian Nilai Zona Integritas (ZI) pada tahun 2024 baik dengan capaian kinerja 84,01 % dari target sebesar 84 dan terealisasi sebesar 70,57.

Dari segi realisasi, Nilai Zona Integritas (ZI) turun 1,20 %dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 73,66% dan tahun 2024 sebesar 70,57%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Tidak bisa dihitung dikarenakan merupakan Indikator baru jadi tidak ada target pada tahun 2023.



Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Nilai Zona Integritas (ZI) tahun 2024 yaitu sebesar 78,41%. dari target akhir RENSTRA sebesar 90% dan terealisasi 70,57% pada tahun 2024.

Indikator Kinerja Tambahan Nilai Zona Integritas (ZI) hanya diampu/digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi/Nasional.

Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan Nilai Zona Integritas (ZI) disebabkan oleh :

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Tidak adanya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi berupa catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pembangunan ZI, hal ini mengakibatkan tidak dilaksanakannya Tindak lanjut hasil monev.
 - b. SK Kepala Dinas PUTR tentang Penetapan agen perubahan belum dibuat, hal ini tidak adanya kontribusi dari agen perubahan
2. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Belum melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen pegawai baru.
 - b. Sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi, berdasarkan Surat Perintah mutasi internal hanya di lakukan untuk pegawai honorer
 - c. belum melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan mutasi internal dengan dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas PUTR dan seluruh dengan kelengkapan dokumen surat undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi kegiatan. Dalam acara tersebut membahas tentang perbaikan perbaikan kinerja dilakukannya mutasi internal pegawai serta diberikan reward dengan tujuan dari mutasi t internal tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
 - d. Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum membuat Training Need Analisis / Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Per Jabatan dengan memperhatikan uraian tugas, kompetensi yang harus dimiliki, kompetensi yang dimiliki saat ini, kompetensi yang perlu dikembangkan, program pengembangan serta justifikasi. Dengan dilakukannya training need analisis maka sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
 - e. dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai belum memperhatikan kinerja dan kemampuan pegawai. Setiap pegawai dianalisis dan selanjutnya direncanakan untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi maka berpengaruh terhadap peningkatan kinerja setiap pegawai dalam melaksanakan tugas yang menjadi jabatannya. Dengan adanya perencanaan pengembangan sesuai kinerja dan kompetensi yang dimiliki karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang maka akan meningkatkan kemampuan individu berjalan dengan baik.

- f. belum menjadikan dasar pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

3. Area Penguatan Pengawasan

- a. Dalam rangka pengendalian gratifikasi belum membuat SK yang di formalkan oleh Kepala Dinas PUTR tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi (Uppg) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dan belum membuat jadwal public campaign tentang pengendalian Gratifikasi.
- b. Implementasi kegiatan pengendalian gratifikasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum membuat Laporan Pelaksanaan Public campaign dan belum membuat laporan pengendalian gratifikasi secara berkala.
- c. belum mengimplementasikan Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi secara sistematis.
- d. Dalam Kegiatan Penerapan SPIP belum melakukan sosialisasi Pengendalian Intern di lingkup pegawai serta di lingkup UPT yang di buktikan dengan Surat Undangan sosialisasi, Notulen, laporan sosialisasi pengendalian dan bukti dokumen tindak lanjut.
- e. Kegiatan Whistle Blowing System di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah diinternalisasi dengan adanya SK namun belum di formalkan (belum diberi nomor). Tentang Pembentukan Whistle Blowing System. SOP kebijakan Penanganan WBS yang ada tidak di lengkapi dengan diagram alir.
- f. Belum dibuatkan register pelaporan Whistle Blowing System secara interal, serta pelaporan melalui aplikasi belum dilaksanakan.
- g. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum dibuatkan pelaporannya meskipun laporaanya tidak di temukan kasus namun pelaporan harus di buat. Dikarenakan aplikasi Whistle Blowing System belum implementasikan maka evaluasi maupun tindak lanjut laporan tidak dapat dilakukan.
- h. Bukti sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan belum dilaksanakan dengan dokumen pendukung berupa surat undangan sosialisasi, daftar hadir dan notulen hasil sosialisasi BK.
- i. Pengelolaan Benturan Kepentingan belum di Implementasikan terhadap proses kegiatan pengadaan tanpa unsur KKN serta pelayanan yang transparans tanpa adanya unsur Gratifikasi terhadap seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- j. Pengelolaan Benturan Kepentingan belum di Implementasikan terhadap proses kegiatan pengadaan tanpa unsur KKN serta pelayanan yang transparans tanpa adanya unsur Gratifikasi terhadap seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah dipublikasikan di Ruang Pelayanan (Ruang tunggu) agar diketahui oleh semua pengguna Layanan yang datang ke SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- b. Hasil survei kepuasan masyarakat belum dapat diakses oleh pengunjung sehingga masyarakat mengetahui kualitas pelayanan yang ada di DPUTR.
- c. tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarkat pada Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang belum ditindak lanjuti berdasarkan hasil survey.
- d. Database pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum terintegrasi dengan baik dengan teknologi Informasi

- e. Belum melakukan Monev SKM dan Membuat Laporan Monev SKM sehingga tidak ada kejelasan untuk melakukan perbaikan
 - f. Belum sepenuhnya upaya inovasi telah mendorong perbaikan pada seluruh bentuk pelayanan Publik.
 - g. belum di buatnya laporan pengaduan secara berkala sehingga tidak ada bukti Tindak lanjut secara berkala.
1. Belum optimalnya Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Sumedang yaitu 483 orang. Adapun paya-upaya yang dilakukan untuk Meningkatnya Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Sumedang adalah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan sebanyak 110 Orang
 2. Belum Optimalnya Layanan informasi jasa konstruksi, ditandai dengan Jumlah data dan informasi jasa konstruksi sebanyak 5 Dokumen. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya Layanan informasi jasa konstruksi adalah Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota sejumlah 1 Dokumen
 3. Belum Optimalnya Pengawasan pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten, ditandai dengan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 97 Proyek. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya Pengawasan pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten adalah Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sebanyak 50 badan usaha.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi :

1. Penguatan Area Majemen Perubahan
2. Pengutaan Area Penataan tata Taksana
3. Penguatan Area Penataan Sistem manajemen SDM
4. Penguatan Area Pengawasan
5. Penguatan Area Peningkatan KUalitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kapasitas Dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas tidak dapat dihitung dikarenakan Capaian Kinerja kurang dari 100%. Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Zona Integritas Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 22.192.671.621,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realsiasinya sebesar Rp. 21.858.361.562,00 atau 98,49 %.

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Zona Integritas Perangkat Daerah Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.192.671.621,00	21.858.361.562,00	98,49
Jumlah Total	22.192.671.621,00	21.858.361.562,00	98,49

Sumber : Dinas PUTR Kab. Sumedang

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 96,18 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)
(1)	2	3	4
URUSAN WAJIB	124.541.378.450,00	119.786.410.053,00	96,18
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	124.541.378.450,00	119.786.410.053,00	96,18
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124.541.378.450,00	119.786.410.053,00	96,18
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	21.885.600.000,00	21.413.258.400,00	97,84
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.885.600.000,00	21.413.258.400,00	97,84
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.599.500.000,00	3.364.674.400,00	93,48
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	16.706.100.000,00	16.514.644.500,00	98,85
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	700.000.000,00	672.567.350,00	96,08
Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa	880.000.000,00	861.372.150,00	97,88
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.595.428.035,00	14.831.790.655,00	95,10
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	15.595.428.035,00	14.831.790.655,00	95,10
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)	200.000.000,00	197.838.100,00	98,92
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	15.395.428.035,00	14.633.952.555,00	95,05
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.449.375.700,00	10.393.389.300,00	99,46
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.449.375.700,00	10.393.389.300,00	99,46
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Spald) Setempat	10.449.375.700,00	10.393.389.300,00	99,46
Program Penataan Bangunan Gedung	1.135.000.000,00	1.085.425.300,00	95,63

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.135.000.000,00	1.085.425.300,00	95,63
Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	585.000.000,00	577.934.700,00	98,79
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (Sbkgb), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (Rtb), Tim Profesi Ahli (Tpa), Tim Penilai Teknis (Tpt), Penilik, Da	550.000.000,00	507.490.600,00	92,27
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	11.009.577.010,00	10.883.866.943,00	98,86
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	11.009.577.010,00	10.883.866.943,00	98,86
Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya	10.339.577.010,00	10.222.680.243,00	98,87
Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	670.000.000,00	661.186.700,00	98,68
Program Penyelenggaraan Jalan	63.041.397.705,00	59.842.407.428,00	94,93
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	63.041.397.705,00	59.842.407.428,00	94,93
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	1.388.414.500,00	1.297.234.890,00	93,43
Penggantian Jembatan	8.649.747.000,00	8.433.844.914,00	97,50
Rekonstruksi Jalan	10.420.336.205,00	9.513.004.859,00	91,29
Pemeliharaan Berkala Jalan	9.135.680.000,00	8.912.859.208,00	97,56
Rehabilitasi Jembatan	1.125.000.000,00	983.876.023,00	87,46
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	670.000.000,00	655.736.961,00	97,87
Rehabilitasi Jalan	23.652.220.000,00	22.519.039.374,00	95,21
Pemeliharaan Rutin Jalan	8.000.000.000,00	7.526.811.199,00	94,09
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	625.000.000,00	592.577.850,00	94,81
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	400.000.000,00	389.317.850,00	97,33
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis	400.000.000,00	389.317.850,00	97,33
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	64.500.000,00	86,00
Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	64.500.000,00	86,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	138.760.000,00	92,51

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)
Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	150.000.000,00	138.760.000,00	92,51
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	800.000.000,00	743.694.177,00	92,96
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	652.820.977,00	93,26
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000,00	148.447.100,00	98,96
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rrtr Kabupaten/Kota	550.000.000,00	504.373.877,00	91,70
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	90.873.200,00	90,87
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.000.000,00	43.791.200,00	87,58
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	47.082.000,00	94,16

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 96,31%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2023)

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 0,13%.

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.114.006.128,00	24.628.065.780,00	98,07	485.940.348,00
		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.114.006.128,00	24.628.065.780,00	98,07	485.940.348,00
		Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa	105.248.360,00	95.182.880,00	90,44	10.065.480,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6.425.000.000,00	6.176.367.250,00	96,13	248.632.750,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18.033.757.768,00	17.815.454.000,00	98,79	218.303.768,00
		Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	550.000.000,00	541.061.650,00	98,37	8.938.350,00

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Terwujudnya sistem penyediaan air minum yang bersih	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.756.414.000,00	8.964.142.576,00	83,34	1.792.271.424,00
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	10.756.414.000,00	8.964.142.576,00	83,34	1.792.271.424,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Spam	325.094.000,00	259.756.000,00	79,90	65.338.000,00
		Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	10.431.320.000,00	8.704.386.576,00	83,44	1.726.933.424,00
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungan yang Tertata	Program Penataan Bangunan Gedung	1.849.801.000,00	1.845.203.000,00	99,75	4.598.000,00
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.849.801.000,00	1.845.203.000,00	99,75	4.598.000,00
		Rehabilitasi, Renovasi Dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	1.245.852.000,00	99,67	4.148.000,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	26.387.999.446,00	24.392.694.150,00	92,44	1.995.305.296,00
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	26.387.999.446,00	24.392.694.150,00	92,44	1.995.305.296,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kabupaten/Kota	300.000.000,00	294.956.696,00	98,32	5.043.304,00
		Penataan Bangunan Dan Lingkungan	26.087.999.446,00	24.097.737.454,00	92,37	1.990.261.992,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	140.566.674.710,00	137.267.283.541,00	97,65	3.299.391.169,00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	140.566.674.710,00	137.267.283.541,00	97,65	3.299.391.169,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	2.494.761.050,00	2.445.445.939,00	98,02	49.315.111,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00	499.477.000,00	99,90	523.000,00
		Rekonstruksi Jalan	29.761.401.948,00	28.343.278.252,00	96,24	1.418.123.696,00
		Rehabilitasi Jalan	49.771.580.232,00	48.599.070.982,00	97,64	1.172.509.250,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	20.317.284.633,00	20.317.284.633,00	100,00	-

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemeliharaan Rutin Jalan	10.500.000.000,00	9.867.283.758,00	93,97	632.716.242,00
		Pembangunan Jembatan	26.487.096.847,00	26.487.096.847,00	100,00	-
		Penggantian Jembatan	350.000.000,00	328.886.130,00	93,97	21.113.870,00
		Rehabilitasi Jembatan	384.550.000,00	379.460.000,00	98,68	5.090.000,00
Meningkatnya ketersediaan informasi pelayanan jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	650.000.000,00	646.875.500,00	99,52	3.124.500,00
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	285.000.000,00	284.562.500,00	99,85	437.500,00
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	285.000.000,00	284.562.500,00	99,85	437.500,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000,00	142.963.000,00	98,60	2.037.000,00
		Penyusunan Data Dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	145.000.000,00	142.963.000,00	98,60	2.037.000,00
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	220.000.000,00	219.350.000,00	99,70	650.000,00
		Penyusunan Sop/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	-
		Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	149.350.000,00	99,57	650.000,00
Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	650.000.000,00	639.794.300,00	98,43	10.205.700,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	496.034.300,00	99,21	3.965.700,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan Rrtr Kabupaten/Kota	500.000.000,00	496.034.300,00	99,21	3.965.700,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.200.000,00	98,93	800.000,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	75.000.000,00	74.200.000,00	98,93	800.000,00

SASARA N	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	69.560.000,00	92,75	5.440.000,00
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	75.000.000,00	69.560.000,00	92,75	5.440.000,00
		Jumlah	205.974.895.284,00	198.384.058.847,00	96,31	7.590.836.437,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagai berikut :

- A. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten Untuk Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 95,67% maka skala nilai kinerja “ SANGAT TINGGI”.
- B. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi untuk Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan Irigasi tercapai sebesar 100,07% maka skala nilai kinerja “ SANGAT TINGGI”.
- C. SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum untuk indicator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tercapai sebesar 100,29% maka skala nilai kinerja “SANGAT TINGGI”.
- D. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata untuk indicator Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata tercapai sebesar 101,69% maka skala nilai kinerja ““SANGAT TINGGI”.”
- E. SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk indicator Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak tercapai sebesar 90,59% maka skala nilai kinerja ““SANGAT TINGGI”.”
- F. SASARAN STRATEGIS 6 : Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk indicator Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan tercapai sebesar 99,97% maka skala nilai kinerja “SANGAT TINGGI”.
- G. SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah untuk indicator Ketaatan Terhadap RTR tercapai sebesar 104,44% maka skala nilai kinerja “SANGAT TINGGI”.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut : (untuk perbaikan kedepan harus hasil dari Analisis Permasalahan IKU dan Program)

1. Penyesuaian Target Renstra DPUTR Tahun 2025-2029 sesuai dengan Total Panjang Jalan Kabupaten Mengikuti surat keputusan Bupati Sumedang Nomor 375 Tahun 2024, panjang ruas jalan 811,318 kilometer.

2. Prioritas penanganan jalan pada kondisi rusak berat
3. Penyelarasan Data Base Irigasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Sumedang
4. Prioritas Penanganan Jaringan Irigasi kondisi rusak berat
5. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha
6. Peningkatan cakupan area layanan Air Minum
7. Melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut dan Evaluasi PBG
8. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat akan penting nya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
9. Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat jangka panjang pemasangan Toilet dan Tangki Septik
10. Penambahan Usulan Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
11. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan jasa konstruksi.
12. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
13. Penetapan RTRW Kabupaten Kota

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.